

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

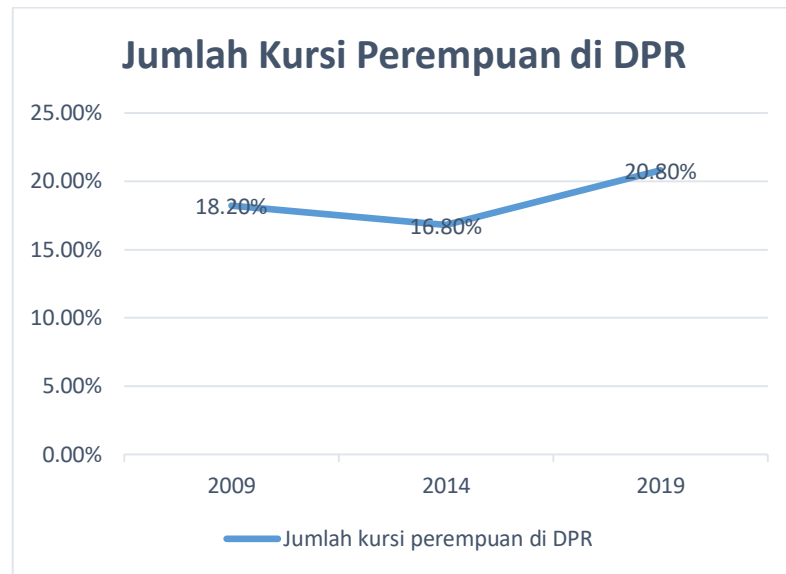
Penjaminan yang di berikan oleh UUD 1945 yang menawarkan kebebasan berpolitik tentu saja dapat di terima oleh seluruh lapisan masyarakat terutama golongan yang sering di marjinalkan pada masa demokrasi sebelum saat ini, salah satunya adalah golongan perempuan yang dulu masih dianggap tabu di beberapa daerah untuk menjadi pemimpin atau berpolitik sehingga momen terbukanya peluang ini banyak di manfaatkan oleh perempuan untuk menunjukkan eksistensi diri mereka dalam politik nasional seperti yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri yang menjadi Presiden RI ke 4 yang juga menjadi pemimpin salah satu partai terbesar yaitu PDI-P.

Sistem demokrasi pancasila juga mengharuskan para wakil rakyat yang akan menjadi representasi dari rakyat di gedung parlemen dipilih melalui Pemilu yang merupakan wujud nyata dari demokrasi prosuderal atau dalam artian Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik (Junaidi dalam Prasetyoningsih, 2014).

Perwujudan dari manifestasi demokrasi yaitu kebebasan berpolitik dan berkelompok sesuai kepentinganya tersebut maka terciptalah Partai Politik yang menjadi instrumen penting dalam demokrasi yang nantinya

dapat menjadi kontestan di Pemilu (Labolo dan Ilham, 2015: 7) selain itu partai politik juga di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik sebagai berikut : Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Semakin berkembangnya partai politik dan sistem demokrasi dalam menjamin kebebasan dalam berpolitik nyatanya belum bisa diimbangi oleh keterwakilan perempuan dalam Partai politik dinilai masih rendah padahal dengan jumlah perempuan yang mencapai 133 juta atau hampir mencapai 50% dari jumlah total penduduk Indonesia yaitu 268 juta, sementara itu menurut data Media Indonesia Indonesia adalah sebagai berikut :



(Sumber : mediaindonesia.com/perempuan-dan-politik)

Salah satu upaya dalam meningkatkan keterwakilan adalah dengan membuat Undang-Undang Undang-Undang N0.12 Tahun 2003 yang berbunyi “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang – kurangnya 30%”. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut menjadi ujung tombak dalam menciptakan dan menggapai harapan para perempuan pada kesetaraan gender. Maka dari itu dengan memberikan sebuah harapan dan kesempatan yang luas terhadap perempuan agar bisa maju ke dalam dunia politik dan menempati jabatan penting yang nantinya akan berguna untuk pengambilan sebuah keputusan yang dimana akan mewakili kepentingan perempuan.

Perjuangan untuk menyetarakan perempuan di politik Indonesia tentu saja tidak mudah, konstruksi perempuan yang hanya berpelembagaan di area domestik telah muncul sejak lama, sehingga untuk masuk di dunia politik yang terkesan sebagai dunia penguasa tentu sangatlah tidak mudah, ketimpangan gender ini sudah di pupuk semenjak orde baru yang membentuk organisasi PKK (Pendidikan Kesehatan Keluarga) untuk semakin mendosmetikan perempuan. PKK ini memang dirancang orde baru untuk mendukung pembangunan pemerintah mulai dari tingkat dusun, lewat sepuluh program utama yang dikenal sebagai Dasa Wisma (Soetjipto, 2013:6).

Kurangnya keterwakilan perempuan yang menjadi faktor utama dalam tindakan afirmatif yang dilakukan oleh pemerintah karena semakin banyaknya produk kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan perempuan atau menghambat perempuan untuk semakin berkembang, peraturan ini sering terjadi di peraturan daerah Seperti yang dinyatakan oleh Azriana Manalu Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia yaitu setidaknya ada 421 kebijakan diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia (Sumber: www.nasional.tempo.com/komnas-perempuan-ratusan-perda-diskriminatif-terhadap-perempuan). Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan nilai utama demokrasi yang memandang semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam berpolitik.

Keterwakilan perempuan di Indonesia adalah hal yang sangat penting. Yang dimana kita dapat melihat bahwa jumlah laki – laki dan

perempuan relatif sama. Tetapi pada nyatanya jumlah keterwakilan perempuan pada legislatif sangatlah kecil. Dengan sedikitnya perempuan yang terdapat di legislatif mungkin itu yang menjadikan isu – isu terkait perempuan belum bisa menjadi yang utama pada hasil kebijakan yang dikeluarkan pemerintah (Raharja, 2019)

Partai dalam hal ini khususnya di daerah perekrutan caleg perempuan merupakan bentuk dalam memenuhi syarat yang ditentukan pada pemilu. Partai belum serius dalam mewujudkan perjuangan supaya partai mempunyai kader perempuan yang mempunyai kemampuan dalam berpolitik. Caleg perempuan di Indonesia sampai sekarang belum dapat meraih suara yang maksimal dalam pemilu. Penyebabnya kurangnya suara perempuan adalah kurangnya memiliki pengetahuan tentang pemilu serta sumber dana (Sumber: mediaindonesia.com/read/detail/291316-keberadaan-perempuan-di-dpr-dinilai-hanya-untuk-penuhi-syarat)

Permasalahan tersebut juga terjadi di kabupaten Purworejo dengan jumlah 45 anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 2019 – 2024, dengan perolehan tiap partai terdiri dari PDIP 10 kursi, Golkar 8 kursi, Demokrat 6 kursi, PKB, Gerindra, Nasdem (5 kursi), PKS, PPP (2 kursi) , Hanura, dan PAN (1 kursi). Dari 45 anggota DPRD tersebut hanya terdapat 6 perempuan yang berhasil maju ke DPRD purworejo, dari 6 legislatif perempuan berasal dari partai Golkar 2 kursi, Gerindra 1 kursi, PKB 1 kursi, Demokrat 1 kursi, dan Nasdem 1 kursi. (Sumber : koranjuri.com/anggota-dprd-kabupaten-purworejo-periode-2019-2024-resmi-dilantik)

Dari data tersebut dapat dilihat yaitu pada Parpol Nasdem Kabupaten Purworejo yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Karena pada Partai Nasdem pada tahun 2014 hanya memperoleh 2 kursi dengan yang berhasil lolos diisi oleh laki- laki. Dan pada tahun 2019 ini Partai Nasdem mulai belajar dari kegagalan tahun 2014 dengan memberikan peluang lebih besar kepada perempuan dengan mewakilkan 18 caleg perempuan dari 45 caleg secara keseluruhan. Hasil pemilu DPRD Purworejo Tahun 2019 partai nasdem mampu memperoleh 5 kursi DPRD, dengan 1 legislatif perempuan yang berhasil lolos. Dari hal tersebut yang membuat penulis tertarik ingin meneliti hal ini. Dengan melihat bagaimana terjadinya proses dan berjalanya kandidat rekrutmen caleg perempuan dalam memenuhi kuota 30 % perempuan pada Partai Nasdem di Kabupaten Purworejo.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan beserta dengan permasalahan yang ada diatas, Penulis memiliki kesimpulan yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Proses Rekrutmen Caleg Perempuan Dalam Partai Nasdem dengan menggunakan teori Norris dan Lovenduski yaitu Supply and Demand untuk memenuhi kuota 30 % Perempuan di Pemilu Legislatif Kabupaten Purworejo Tahun 2019 ?
2. Faktor – faktor apa saja yang memberikan pengaruh terhadap keterwakilan perempuan pada rekrutmen caleg perempuan Partai NasDem Tahun 2019 di Kabupaten Purworejo ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan pada berjalanya penelitian kali ini adalah :

1. Agar dapat mengetahui proses rekrutmen caleg perempuan pada partai nasdem di Kabupaten Purworejo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Pada Proses berjalanya penelitian kali ini terdapat tiga manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat Penulis

Pada manfaat kali ini bagi penulis adalah dapat memberikan pengalaman serta ilmu / wawasan yang sangat berharga dalam melakukan penelitian dan menganalisis tentang proses berjalanya

rekrutmen caleg perempuan dalam pemenuhan kouta 30 % pada Partai Nasdem Kabupaten Purworejo.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah dalam hasil penelitian supaya dapat mampu memberikan referensi dan acuan kepada penelitian lain tentang rekrutmen caleg perempuan pada pemenuhan kouta 30 %.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis pada penelitian ini adalah diharapkan mampu menyadarkan dan membuat pemikiran terbuka bahwasanya perempuan juga mampu dalam berpolitik agar membuat perempuan tidak takut dan pesimis untuk maju dalam menyuarakan haknya dan ide – idenya akan peranan pentingnya dalam dunia politik serta dapat menjadikan sebuah landasan pemikiran tentang rekrutmen caleg perempuan dalam mengembangkan studi pada dunia perpolitikan Indonesia.

1.4 Tinjauan Pustaka

No	Judul	Penulis	Tahun	Isi
1.	Keterwakilan Perempuan Partai Nasdem Pada Pencalonan Anggota Legislatif DPRD Surabaya Pemilu 2014	Wasiun Nikmah	2014	Penelitian ini memfokuskan tentang keterwakilan caleg perempuan pada partai nasdem di Surabaya saat pencalonan legislatif DPRD Surabaya. Kemudian dalam

				<p>penelitian ini juga memfokuskan untuk menjawab persoalan dua masalah utama yaitu : hambatan yang dihadapi caleg perempuan dan bagaimana penerapan ketentuan kouta 30% perempuan di Partai Nasdem Pada pencalonan legislatif DPRD Surabaya 2014.</p>
2.	<p>Rekrutmen Politik Caleg Perempuan Dalam Memenuhi Kouta 30 % di Partai Keadilan Sejahtera Provinsi DIY Tahun 2019</p>	Rubiyati	2019	<p>Pada penelitian ini memfokuskan pada proses dan faktor – faktor yang mendukung caleg perempuan untuk maju caleg legislatif di Partai PKS pada Pemilu 2019 di DIY</p>
3.	<p>Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi di</p>	<p>Mahathir Muhammad Iqbal, Ahmad Syaiful Kurniawan</p>	2020	<p>Pada penelitian ini memfokuskan pada terdapatnya indkator – indokator dalam proses perekrutan caleg perempuan</p>

	DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang)			dan mekanisme berjalanya perekrutan caleg perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilihan legislatif di Kabupaten Malang
4.	Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Politik Perindo Pada Pemilihan Umum 2019 di Sumatera Utara	Madin Silalahi, Parlindungan Marpaung, Dolly Tua Mulia Raja Panjaitan, dan Bastian Da'o	2020	Pada penelitian ini memfokuskan pada proses DPW partai perindo dalam perekrutan perempuan yang mempunyai kemampuan untuk dicalonkan sebagai legislatif dan penelitian ini juga membahas pada fungsi yang diterapkan dalam perekrutan perempuan apakah sudah sesuai dalam menjalankan fungsi rekrutmen secara baik di Partai Perindo pada pemilu 2019 Sumatera Utara
5.	Fenomena Keterwakilan Perempuan di DPRD	Chairunnisa	2015	Pada penelitian ini memfokuskan pada

	Kabupaten Pamekasan – Madura Periode 2014			rekrutmen dari partai – partai yang mencalonkan perempuan untuk menjadi legislatif di Kabupaten Pamekasan karena pada prakteknya dalam setiap partai memiliki metode yang berbeda – beda dan kemudian penelitian ini juga berfokus pada motif DPRD perempuan untuk ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Pamekasan
6.	Komunikasi Politik Caleg Perempuan Untuk Pemilihan Anggota Legislatif Kota Palembang	Dhiana Dewi Sartika	2016	Pada penelitian ini berfokus pada cara komunikasi politik yang diterapkan oleh para caleg perempuan agar mampu memberikan pengaruh suara supaya mampu lolos menjadi anggota legislatif.

7.	Strategi Rekrutmen Caleg Perempuan Pada Pemilu 2019 Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Gresik	Mukaukabah Alwadlo	2019	Pada penelitian ini berfokus pada cara atau strategi dalam rekrutmen caleg perempuan dalam pemilu 2019 dan faktor – faktor yang menghambat dalam proses rekrutmen caleg perempuan dalam partai PPP.
8.	Motivasi Keterwakilan Perempuan dalam Politik Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Tanah Laut	Mariatul Kiptiah	2019	Pada penelitian ini berfokus pada motivasi yang mendorong keikutsertaan dalam kontestasi pemilu dan melihat presentase caleg perempuan dari tahun 1992 – 2014 di Kabupaten Tanah Laut.
9.	Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Pengurus dan Caleg di DPW PAN Jawa Timur Pada Pemilu 2014	Andi Suwarko	2014	Pada penelitian ini berfokus pada kuota politik perempuan dalam keterwakilannya yang dimana merupakan syarat untuk partai politik, pada struktur kepengurusan maupun caleg

				pada pemilu tahun 2014. Penelitian ini juga mendalami tentang implementasi dan kendala kuota perempuan dalam caleg ataupun pengurus.
10	Menghadirkan Kepentingan Perempuan Dalam Representasi Politik di Indonesia	Dirga Ardiansa	2017	Pada penelitian ini berfokus pada tiga drkusus utama dalam perkembangan representasi politik akhir – akhir ini, kemudian membahas tentang konteks praktik representasi politik yang ada di Indonesia dengan melihat tiga dikursus tersebut.

Dari beberapa penelitian di atas, penulis melihat belum ada yang melakukan riset rekrutmen caleg perempuan dalam pemenuhan kouta 30 % di Partai Nasdem Kabupaten Purworejo tahun 2019. Selain itu pada penelitian ini belum ada yang menggunakan teori Lovenduski dan Norris yaitu *Supply and Demand model of Recruitmen*. Oleh karena itu penelitian ini berbeda dengan penelitian

– penelitian yang sudah ada sebelumnya karena penelitian ini baru pertama kali untuk diteliti.

1.5 Kerangka Dasar Teori

1.5.1 Partai Politik

Awal mula partai politik lahir di negara – negara eropa barat. Partai politik lahir dari bentuk sebuah spontanitas, yang dimana terdapat gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam berjalannya proses politik sehingga partai – partai politik bermunculan atau lahir dengan spontan kemudian berkembang sangat pesat dan menjadi wadah atau tempat untuk rakyat dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah (Sunggono, 1992: 7).

Pada kamus politik, partai merupakan kelompok atau perkumpulan orang yang memiliki ideologi yang sama dan memiliki tujuan bersama dalam politik dan menurut Roy C. Marcidis partai diartikan sebagai sebuah landasan untuk memperoleh kekuasaan dan menjadi alat dalam memerintah (Amal, 1988: 1). Politik adalah bentuk dari macam kegiatan berpolitik atau bisa disebut juga negara yang ikut menentukan proses dalam menentukan sebuah tujuan dari sistem politik dan bertujuan menjalankan tujuan sistem politik itu sendiri (Budiardjo, 2003: 8)

➤ Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan kelompok atau kumpulan orang yang dipersatukan dengan persamaan dalam berideologi yang memiliki sebuah tujuan bersama dalam mempertahankan dan mengejar

kekuasaan pada pemilihan umum agar dapat mewujudkan usulan kebijakan yang sudah disusun (Surbakti, 1992: 116).

Terdapat banyak pengertian terkait dengan definisi partai politik menurut ahli :

a. Sigmund Neumann

Partai politik merupakan organisasi yang diisi para aktor – aktor politik yang memiliki sifat aktif dalam bermasyarakat contohnya mereka memberikan bentuk perhatian dalam mengendalikan kekuasaan pemerintahan agar dapat bersaing dalam mendapatkan suatu dukungan secara maksimal dari masyarakat pada banyak kelompok yang lainya mempunyai sebuah pandangan yang tidak sama (Kusnardi dan Bintang R.saragih, 1988: 267).

b. Jean Blondel

Partai politik merupakan sebuah organisasi anggota yang memiliki sifat terbuka, yang mempunyai fokus dengan spektrum sosial kebijakan (Suryadi, 2005: 57)

c. R.H Soltau

Partai politik adalah sekumpulan masyarakat negara yang memiliki organisasi yang baik, yang mempunyai tindakan sebagai kesatuan politik melalui pemanfaatan kekuasaan yang sudah ada dengan memiliki tujuan agar mampu menguasai

pemerintahan dan melakukan kewajiban yang memiliki sifat umum kepada mereka (Budiarjo, 2003: 161)

d. Carl J. Friedrich

Partai politik merupakan organisasi yang memuat sekumpulan orang yang terorganisir yang mempunyai tujuan mempertahankan atau merebut kekuasaan terhadap pemerintah dengan pimpinan partai dengan berdasarkan kekuasaan itu menyampaikan kepada anggota bahwa pemanfaatan partai yang adil baik mempunyai sifat materil ataupun non materil (Budiarjo, 2003: 161)

➤ **Fungsi Partai Politik**

Dalam Perpolitikan, partai politik memiliki beberapa fungsi seperti yang dipaparkan oleh Miriam Budiarjo dalam A.Rahman H.I (2007: 103-104) :

a. Partai menjadi sarana komunikasi politik :

Menurut Sigmund Neumann dalam kaitannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan sebuah perantara yang bisa menghubungkan dalam hal ideologi sosial terhadap pemerintah yang mempunyai kaitan pada warga negara. Akan tetapi dalam menjalankan pelaksanaan fungsi komunikasi politik membuahkan informasi yang di dalamnya terdapat isu – isu yang akan berdampak kepada masyarakat dengan memiliki

rasa resah karena mendukung atau memihak salah satu kelompok (Budiarjo, 2008: 406)

b. Partai politik menjadi sarana sosialisasi politik :

Menurut pendapat M. Rush dalam (A. Rahman H.I 2007: 103-104) sosialisasi politik adalah sebuah proses yang dimana memberikan pembelajaran dan pengetahuan kepada masyarakat yang belajar tentang sistem politik. Proses ini nantinya akan berpengaruh terhadap penentuan masyarakat dalam persepsi dan reaksi kepada fenomena politik.

c. Partai menjadi sarana rekrutmen politik

Partai politik merupakan organisasi yang memiliki peran dalam proses pencalonan dan perekrutan yang mempunyai kualitas dan memiliki wawasan yang luas dalam perpolitikan. Fungsi partai politik itu sendiri dalam rekrutmen merupakan peranan yang sangat penting baik sebagai kontinuitas dan keberhasilan partai politik tersebut maupun dalam mencetak calon pemimpin bangsa serta wakil rakyat yang mempunyai kualitas (Afifa, 2011).

Partai politik mempunyai suatu kepentingan dalam memberikan tempat kepada kader – kadernya untuk duduk dalam jabatan – jabatan politik di pemerintahan agar dapat memberikan suara dan dapat mengajukan kepentingan dalam partai dan masyarakat yang diwakili. Partai politik harus dapat menjalankan

peranan dalam fungsi melakukan rekrutmen politik supaya mampu menempatkan kader – kader terbaik. Partai politik wajib mempunyai prosedur atau aturan rekrutmen politik yang wajib dipatuhi dan dijalankan oleh kadernya. Pada rekrutmen politik inilah partai politik harus mampu menunjukkan kemampuan dalam menjalankan demokrasi pada internal partai. Jika dalam internal partai tidak dapat menjalankan demokrasi secara baik, bagaimana partai politik dapat berdemokrasi dalam menjalankan dan mengelola kehidupan bernegara (Metera, 2011).

Pada partai politik yang memiliki kader – kader politik yang baik serta berkompeten, partai tidak akan kesulitan dalam memilih pemimpinnya serta memiliki peluang dalam mengajukan calon yang akan masuk ke bursa kepemimpinan nasional (Budiardjo, 2008: 408). Dalam hal ini partai politik mempunyai peran tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik. Pada pengertiannya partai politik harus ikut serta dalam memperluas tingkat partisipasi politik masyarakat. Usaha pada rekrutmen politik bisa dilakukan dengan cara persuasi (pendekatan), kontak pribadi, dan merekrut golongan muda agar dididik menjadi kader yang nantinya akan menjadi penerus untuk menggantikan pemimpin lama pada masa yang akan datang (Suprihatini, 2008:19).

1.5.2 Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik menurut Ramlan Surbakti adalah bentuk pemilihan serta perekrutan atau pengangkatan sekelompok orang untuk mengemban amanah dalam menjalankan beberapa kepentingan dalam sistem politik yang pada dasarnya di pemerintahan yang sekelompok orang memiliki bakat menonjol dan partai politik memiliki tugas dalam memberikan kewenangan serta menempatkan menjadi seorang calon pemimpin (Surbakti, 1992: 118).

➤ Pola Rekrutmen

Pola merupakan sistem, corak, bentuk, model yang mempunyai sifat secara struktur cara kerja, dan tetap serta rencana. Pola rekrutmen merupakan kumpulan dari berbagai macam praktek rekrutmen yang dilakukan partai politik. Pada umumnya berbagai partai politik harus memiliki sebuah prinsip agar terbuka bagi sekelompok sosial mana saja. Tetapi sangat susah dalam menghindari adanya kecenderungan tipe pada partai politik dalam mensejajarkan perbedaan pada menetapkan konsep rekrutmen yang dirasa ideal bagi partainya (Erawan, Imawan dkk, 2010:17).

Pendapat dari Rush dan Althoff (Tangkilisan, 2003: 188) sistem rekrutmen politik dipilah menjadi dua cara. Pertama, rekrutmen terbuka adalah menyediakan dan memberikan kesempatan yang merata atau adil dan harus sama oleh seluruh warga negara untuk dapat mengikuti dalam partisipasi secara langsung atau juga ikut

bersaing dalam proses rekrutmen yang diselenggarakan. Kedua, rekrutmen tertutup adalah memberikan kesempatan untuk mengikuti dalam bertaspasi dan menduduki jabatan politik itu tidak berlaku sama bagi setiap masyarakat yang berarti kesempatan itu diberikan kepada sekelompok orang tertentu yang dapat duduk di kursi pada jabatan politik.

➤ **Faktor – faktor yang meberikan pengaruh dalam proses rekrutmen politik :**

- a. Faktor politik. Faktor politik disini terbagi menjadi politik nasional dan politik lokal. Faktor politik nasional merupakan sebuah kepentingan politik yang berasal dari pusat dalam pada proses pemilihan yang dilaksanakan. Sedangkan faktor politik lokal merupakan proses politik yang berupa dukungan bersumber dari rakyat kepada calon – calon yang sudah diajukan (Waki, 2002).
- b. Faktor politik, sosial ekonomi, yaitu politik yang mempunyai hubungan dengan sebuah nilai yang terdapat di masyarakat yang dimana pemilihan juga harus mampu memberikan cerminan soal kepentingan – kepentingan pada kalangan elit politik. Partai atau sekelompok yang mempunyai kekuasaan akan memangku kendali pada distribusi nilai yang ada dalam masyarakat (Waki, 2002).

- c. Faktor sosial budaya. Faktor ini merupakan hubungan dengan sebuah tradisi dan budaya yang sudah lama berkembang pada masyarakat. Budaya atau tradisi yang ada pada masyarakat yang telah berkembang mempunyai sifat otoriter atau cenderung demokratis, yang dimana dalam proses tersebut akan memberikan dampak pada pemilihan yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan pada nilai – nilai demokratis yang berkembang seperti biasanya dalam proses politiknya akan cenderung demokratis (Waki, 2002).

1.5.3 Pemilihan Umum

Pendapat dari Adrew Reynolds, pemilu adalah sebuah lembaga demokrasi yang dipergunakan dalam menentukan serta memilih para pembuat keputusan yang pada dasarnya masyarakat juga dapat berperan serta terlibat secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan. Menurut pendapat Ibnu trichayono pemilu merupakan instrument dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang bertujuan membangun atau membentuk pemerintahan yang baik serta sarana atau tempat dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat (Labolo,M., Ilham,T., 2015: 50).

Pada dasarnya praktik dalam pemilu bahwa yang menjalankan kedaulatan adalah para wakil rakyat yang akan duduk dalam jabatan pemerintahan. Supaya dalam berjalannya wakil rakyat benar – benar bertindak dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak rakyat,

yaitu mekanisme pemilu (*general election*) (Asshidiqqie, 2009: 414). Pemilihan umum pada teori demokrasi liberal merupakan sebuah penghubung dari suatu prinsip kedaulatan rakyat dan praktik yang dijalankan pemerintah oleh beberapa oknum pejabat. Masyarakat dalam memilih pemimpin dan dalam diputuskannya sebuah isu harian yang substantif melalui mereka (Arifin & Arifudin, 2017: 17)

➤ **Sistem Pemilu**

Sistem pemilu merupakan sebuah konversi perolehan suara pada pemilu menjadi hasil dari perwakilan kandidat dari setiap partai yang menang untuk dapat duduk dikursi – kursi yang di menangkannya (Reynolds, 2016: 19). Maka dari itu, pada negara modern pemilihan umum menjadi sebuah tonggak demokrasi. Pada dasarnya esensi dari demokrasi secara universal diartikan pemerintahan yang dalam pemilihan dipilih secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil rakyat yang represntatif (Tricahyono, 2009: 6).

Setelah dilaksnakannya perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR dalam siding tahun 2001, masalah dalam pemilu mulai di atur pada UUD 1945 Bab VII B tentang pemilu. Kemudian ketentuan tersebut dilakukan elaborasi kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.3/PUU-VII/2009. Yang dimana MK mengatakan ketentuan UUD 1945 harus memiliki rambu – rambu yang mengatur jalannya proses pemilu meliputi: 1. Pemilu diselenggarakan dalam periode lima tahun sekali, 2. Dalam terselenggaranya pemilu

menganut asas luber dan jurdil, 3. Tujuan dalam pemilu adalah untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, 4. Dalam pemilu peserta berasal dari partai politik dan perorangan, 5. Tentang terselenggaranya pemilu (Ramadhan, 2018).

Sistem pemilu yang dipakai di Indonesia menggunakan sistem proporsional. Sistem proporsional adalah jumlah kursi yang dimenangkan partai di suatu wilayah pemilihan harus seimbang dengan jumlah suara yang didapatkan partai pada pemilu (Pamungkas, 2009: 30). Indonesia menggunakan varian sistem proporsional representation yang dimana dalam varian tersebut memiliki tujuan supaya mampu menghasilkan lembaga perwakilan pada jumlah kursi dan jumlah suara yang dimenangkan pada setiap partai (Labolo, 2015: 73). Dalam pemilu tahun 2019 Indonesia menggunakan Proporsional Representation terbuka, dalam sistem ini rakyat berhak memilih partai sekaligus beserta kandidat yang sesuai dengan keinginannya untuk dapat mengisi kursi yang dimenangkannya (Satriawan, 2019).

➤ **Faktor – faktor yang memberikan pengaruh pada kemenangan pemilu**

a. Figur Politik

Figur politik merupakan orang yang dianggap memiliki peranan sentral dan mempunyai kekuasaan di daerah baik dari segi non materi maupun segi materi yang kemudian akan dijadikan sebagai caleg (Koirudin, 2004: 111).

b. Fanatik terhadap partai

Fanatik terhadap partai merupakan para pemilih tradisional yang merupakan pemilih setia terhadap partai atau figure tokoh yang terdapat dalam partai yang dimana para pemilih akan memberikan suaranya berdasarkan tokoh yang bersangkutan (Koirudin, 2004: 111).

c. Intesitas praktek politik uang

Dalam hal ini para pemilih yang mempunyai pola pikir pragmatis berpikiran akan mendapatkan keuntungan dalam hal materi contohnya uang akan mempunyai pertimbangan utama pada saat memilih suatu partai politik (Koirudin, 2004: 111).

d. Progam partai terkait dengan perbaikan ekonomi masyarakat

Isu dalam perbaikan ekonomi merupakan hal yang menjadikan unggulan pada progam utama partai terkait perbaikan ekonomi. Hal seperti ini telah terbukti pada zaman orde baru yang dimana terdapat keinginan pada masyarakat dalam menghendaki ekonomi (Koirudin, 2004: 111).

1.5.4 Model Rekrutmen

Pada peneelitan ini dalam model rekrutmen menggunakan *Supply and demand model of recruitment* (Norris and Lovenduski, 1993: 378). Yang dimana dalam model rekrutmen terdapat latar belakang masalah, sumber daya, dan motivasi. Pada dasarnya dari berbagai aspek tersebut akan dijelaskan menurut pokok bahasannya sendiri – sendiri.

➤ **Latar belakang sosial :**

a. Kelas pekerjaan

Supply menurut Ranney merupakan kelas pekerjaan pada parlemen yang menyediakan dalam karir politik contohnya waktu jam kerja yang fleksibel, status sosial, kontak politik, dan keterampilan politik. *Demand* menurut Jacob merupakan karir pada parlemen yang diberikan fasilitas pekerjaan yang memberikan tunjangan karir, penggabungan antara fleksibilitas dari waktu ke waktu, jaringan publik, kemandirian profesional, status sosial, keterampilan pada kehidupan berpolitik, dan pengalaman kebijakan.

b. Pendidikan

Menurut Ranney dalam sisi permintaan adalah para anggota partai wajib memilih orang yang mempunyai kemampuan atau pendidikan yang baik, karena dalam hal ini status sosial dan memiliki kemampuan partai harus memilih orang – orang terbaik untuk mengisi jabatan politik.

c. Jenis kelamin

Dalam sisi permintaan menurut pendapat dari Vallance bahwa partai politik tidak mau mencalonkan perempuan untuk dapat memenangkan kursi politik, karena masyarakat dalam memilih mempunyai prasangka yang kurang percaya kepada para kandidat perempuan, maka dari itu partai takut akan kehilangan suara pada

kandidat perempuan yang diajukan. Dalam sisi penawaran menurut Bochel dan Danver mereka berpendapat bahwasanya dalam sisi penawaran apabila perempuan dalam hal ini lebih banyak maju dalam mengejar karir parlemen maka akan mampu untuk dapat dinominasikan.

d. Ras

Dalam ras banyak orang yang berasumsi bahwasannya mereka akan curiga terhadap orang berkulit hitam, karena terdapat anggapan tentang orang kulit hitam pada Partai Buruh. Orang yang mempunyai kulit hitam hanya mempunyai peranan tertentu dalam mendukung perpolitikan yang ada.

e. Usia

Dalam hal ini usia muda sangat memiliki motivasi dalam kenaikan jabatan yang lebih tinggi. Pengaruh usia sangat mempengaruhi dari segi permintaan, mereka yang mencari jabatan untuk duduk di pemerintahan pada usia hingga akhir 30an mungkin akan lebih baik untuk dipecah karena akan mempunyai waktu dalam pembuatan catatan aktivitas politik, jaringan partai yang baik, serta pengalaman layanan publik.

➤ **Sumber daya**

a. Waktu

Pada hal ini yang paling penting dalam sumber daya adalah waktu yang dimana kantor, organisasi, partai politik, parlemen

akan menuntut dalam acara sosial, kehadiran rapat, berbicara di depan umum, penggalangan dana, kampanye pada pemilu.

b. Keuangan

Pada hal ini keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam keikutsertaannya pada pemilu karena calon akan mengocek dana pribadi pada kampanye, transportasi dalam mengunjungi setiap tempat, kemudian dalam memberikan bantuan kepada masyarakat agar mereka dapat dipilih. Keuangan sangat mempengaruhi dalam sisi penawaran daripada permintaan karena bagi mereka yang tidak mempunyai penghasilan yang tinggi tidak akan mampu untuk membayar investasi keuangan untuk dapat memangku jabatan politik, terutama dalam politik resiko kegagalan pada pemilu.

c. Pengalaman politik

Pengalaman politik juga akan mempengaruhi keterpilihan calon yang akan ikut serta dalam kontestasi pemilu. Sebagaimana anggota yang sudah memiliki jabatan publik serta pengalaman dalam berpolitik diharapkan agar dapat mengembangkan skilnya dalam politik, karena itu akan sangat berguna dalam pengetahuan praktis dari pemerintah, tentang keterampilan, dan kemudian juga kontak sosial akan sangat berpengaruh dalam mendapatkan tempat duduk di parlemen.

d. Jaringan pendukung

Pada jaringan pendukung nantinya akan memberikan peran dalam saran, dukungan langsung, serta sumber informasi. Orang – orang yang mendapatkan dukungan luas dari keluarga, kerabat, beserta dukungan dari masyarakat akan lebih cenderung untuk mempertimbangkan karir parlemen, dan akan lebih baik ditempatkan untuk mendapatkan kursi politik.

➤ **Motivasi**

a. Ambisi politik

Terdapat banyak orang yang mempunyai sumber daya tetapi tidak mau untuk masuk ke dalam dunia politik. Dengan adanya kombinasi pada sumber daya dan motivasi akan menghasilkan sesuatu yang sangat diperlukan pada kandidat untuk terjun ke dunia politik.

b. Dorongan

Dorongan dalam politik akan penting apabila kandidat mempunyai kegigihan dalam politik yang nanti diharapkan akan jauh lebih berhasil.

➤ **Faktor – Faktor dalam memberikan pengaruh perempuan di politik**

Norris dan Lovenduski (1995) berpendapat bahwa terdapat dua faktor penawaran/*supply* dan permintaan/*demand* yang dimana dari kedua faktor tersebut yang menjadikan kurangnya keterwakilan pada perempuan. Pada penjelasannya bahwa dalam faktor penawaran,

perempuan masih banyak yang tidak tertarik untuk terjun ke dalam dunia politik. Dan pada penjelasan dari segi permintaan yang berhubungan dengan pemilihan, pihak – pihak tertentu dan partai politik masih mendiskriminasi perempuan untuk terjun ke dunia politik. Norris dan Inglehart (2000: 3) berpendapat bahwa pada budaya tradisional, perempuan merasa sungkan untuk dapat ikut serta dalam kontestasi politik atau duduk dalam jabatan publik. Dalam aspek penawaran dan permintaan tidak hanya menuduh partai politik dalam hal ini akan tetapi juga masalah dari diri perempuan yang masih kurang tertarik pada dunia politik.

➤ ***Supply/Struktural/Penawaran***

a. Kondisi sosial ekonomi bangsa

Richard Matland (1998: 114) berpendapat jika negara ingin menjadi lebih maju maka dari itu perempuan akan meningkat dan aktif dalam keterlibatannya pada semua aspek kehidupan politik. Dalam hal ini pengembangan akan mampu memberikan beberapa kebebasan kepada perempuan untuk terlepas pada kegiatan atau tugas sehari – hari, pada dasarnya nanti akan membuat peningkatan jumlah perempuan yang tersedia dalam jabatan politik (Paxton, 1997: 448).

b. Faktor budaya dan agama

Budaya memberikan penekanan moral, yang dimana akan menyebabkan ketergantungan politik itu sangat kurang dalam

gambaran perempuan. Kesenjangan pada kesetaraan gender pada representasi politik tersebut memberikan petunjuk bahwa faktor sosial ekonomi dan budaya, serta faktor politik mempunyai peran yang sangat berpengaruh (Moore dan Shackman, 1996: Paxton, 1997: Matlanda, 1998: Kenworthy dan Malami, 1999).

Kemudian pada faktor agama peran perempuan sangat banyak aturan yang dimana harus taat terhadap tradisi agama dan keluarga. Doktrin pada agama sangat perlu untuk ditangani, karena ajaran yang diberikan oleh agama bertanggungjawab terhadap memperkuat dan menciptakan kebiasaan yang nantinya akan menyebabkan rendahnya kontribusi status perempuan di Indonesia.

c. Pendidikan

Pada pendidikan peningkatan kemajuan perempuan pada dunia perpolitikan bergantung pada yang mereka lakukan untuk memberikan tingkat kemajuan di luar politik (Randall, 1987: Chafetz, 1991). (Wade & Seo, 1996: 44) Berpendapat bahwa perempuan yang mempunyai pendidikan yang tinggi akan menjadikanya lebih sadar politik kemudian juga akan lebih tegas secara aktif dalam berdiskusi serta partisipasi dalam dunia politik.

➤ ***Demand/Permintaan***

a. *Political culture*/Budaya politik

Pada hal ini partai politik tidak hanya sebagai sumber kekuasaan dan memberikan pengaruh akan tetapi juga menjadi pengatur waktu dalam mencalonkan kandidat karena mempunyai kekuatan (Norris, 1997: 218).

b. *Electoral systems/Sistem pemilihan*

Menurut Norris dan Lovenduski (1995) dalam sebuah sistem pemilihan yang terdapat jumlah tinggi kursi untuk memberikan fasilitas masuknya perempuan. Sistem pemilihan merupakan fasilitator, akan tetapi kondisinya tidak cukup dengan tingkat keterwakilan perempuan yang cukup tinggi.

c. *Kursi / kouta cadangan*

Kursi atau kouta cadangan yang telah disediakan yang nantinya ditempati oleh kelompok minoritas dan dalam kelompok tersebut perempuan mendominasi. Disini perempuan mempunyai akses dari kuota, yang dimana perempuan tidak akan bisa bertindak secara independen dalam memberikan pengaruh terhadap setiap kebijakan. Kuota memberikan pembatasan dan telah dibenarkan dalam peningkatan pesat perempuan di dunia politik. Hal ini merupakan transisi yang nantinya akan memberikan penerimaan yang lebih lebar kepada perwakilan perempuan dalam dunia politik.

d. *Nature of the regime/Sifat rezim*

Menurut Metland dan Taylor (1997) mereka berasumsi bahwa peran dominan laki laki dengan masyarakat patrimonial merupakan sebuah pencapaian signifikan Kosta Rica dalam perempuan di politik. Perempuan yang ada di Kosta Rica menduduki sejumlah jabatan pemerintahan yang tinggi.

Dari penelitian Moore dan Shackman (1996) bahwa korelasi positif dalam negara demokratis akan memiliki jumlah perempuan yang lebih banyak pada lembaga legislatif daripada negara yang tidak demokratis yang dimana jumlah kandidat perempuan merupakan pengaruh negatif yang dilakukan oleh sifat rezim.

1.5.5 Kouta 30 % Bagi Caleg Perempuan

Pada kouta 30 % bagi caleg perempuan menjadi sebuah pembicaraan yang sangat penting kemudian ditetapkannya UU pemilu terkait keterwakilan perempuan :

Bab VII pasal 65 ayat 1 : “Setiap partai politik peserta dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”.

➤ Faktor – faktor yang memberikan pengaruh perempuan dalam politik

a. Kualitas Kandidat

Kualitas kandidat merupakan bentuk karakteristik yang kandidat miliki supaya memberikan suara baginya agar dipilih dalam memangku jabatan politik dan menunjukkan skill serta

kapabilitasnya sebagai politisi (Jacobson dan Karnell, 1983). Kualitas kandidat dilihat dari tiga variable diantaranya meliputi pelatihan, pendidikan, dan pengalaman politik yang harus kandidat miliki (Purwaningsih, 2015).

➤ **Faktor – faktor yang menghambat dan mendukung perempuan untuk berperan aktif di dalam politik (Hud, 2008) :**

a. Pendapatan (income)

Dalam hal ini seseorang yang memiliki penghasilan yang tinggi, memiliki pendidikan yang baik, serta mempunyai status sosial yang tinggi maka dapat dilihat bahwasannya orang yang memiliki pendapatan yang tinggi akan ikut berpartisipasi secara aktif dibandingkan dengan orang yang memiliki pendapatan rendah, pendidikan rendah, dan memiliki status sosial yang rendah (Budiarjo, 1982: 1).

b. Tingkat status sosial ekonomi yang tinggi (pendidikan, pekerjaan, penghasilan)

Pada kemampuan pendapatan yang tinggi maka dapat memberikan dampak dalam kesempatan untuk mampu terlibat aktif pada kehidupan politik (Raul, 1999: 7-10).

c. Kultur yang dimiliki Indonesia

Kultur yang ada di NKRI lebih cenderung tidak menempatkan perempuan dalam politik, dalam kepentingan perempuan, kepentingan partai sering

berbanding terbalik dengan sebuah kepentingan perempuan dalam politik (Jurnal Perempuan, 133).

1.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual berarti memberikan gambaran dengan jelas tentang konsep yang akan dipakai pada penelitian agar menghindari kesalahan dalam pemaknaan dan pemahaman yang terdapat dalam pokok masalah peneliti.

1.6.1 Partai Politik

Partai Politik memiliki arti suatu forum / kelompok yang memiliki susunan sistematis serta didalamnya terdapat anggota – anggota yang memiliki tujuan dengan visi – misi agar tercapainya sebuah cita – cita bersama dalam mewujudkan partai yang lebih baik.

1.6.2 Rekrutmen

Rekrutmen merupakan sebuah proses dalam pemilihan kader atau anggota dalam mengisi jabatan dan rekrutmen juga melalui sebuah cara penyeleksian dengan memilih seseorang yang memang berkompeten dan memiliki skill dalam mengisi atau menduduki jabatan.

1.6.3 Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sebuah acara atau juga bisa dikatakan sebagai lembaga yang bertugas dalam memilih wakil rakyat yang bertujuan untuk mewakili suatu pemikiran, gagasan, dan kepentingan rakyat.

1.6.4 Kouta 30 % Perempuan

Kouta 30 % untuk perempuan merupakan sebuah kebijakan yang diterapkan pemerintah dan harus dipatuhi setiap partai politik dalam setiap agenda pemilu dengan menyertakan minimal terdapat 30 % perempuan dari jumlah caleg yang akan mewakili.

1.7 Definisi Operasional

Rekrutmen Politik Caleg Perempuan Demokrat dapat kita lihat dari :

1.7.1 Supply :

- Latar Belakang Sosial : Pendidikan, Jenis Kelamin, Kelas Pekerjaan, Usia
- Sumber daya : Financial , banyak dan jaringan pendukung, pengalaman politik
- Motivasi : Dorongan, ambisi

1.7.2 Demand :

- Bentuk rekrutmen caleg perempuan
Bentuk upaya partai dalam pemenuhan kouta 30 % serta merekrut caleg perempuan yang memiliki kompeten serta pengetahuan dalam berpolitik.
- Mekanisme rekrutmen
Mekanisme atau cara yang diterapkan partai untuk rekrutemen kader atau caleg perempuan untuk mengisi jabatan dengan proses penyeleksian dengan memilih kader atau caleg yang memang benar – benar memiliki kompeten.M
- Kebijakan partai

Kebijakan yang diterapkan partai dalam pemenuhan kouta 30% caleg perempuan.

1.7.3 Faktor – Faktor Yang Memberikan Pengaruh Perempuan Dalam Politik

- *Supply / Struktural* : Faktor Kondisi Sosial Ekonomi Bangsa, Pekerjaan, budaya, Pendidikan, Agama
- *Demand / Politik* : Budaya Politik, Nature of the regime, kursi / kouta, sistem pemilihan
- Kualitas Kandidat : Pengalaman Politik, pelatihan, Pendidikan
- Faktor yang mendukung dan menghambat

1.8 Metode Penelitian

1.8.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif – kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor berpendapat bahwa menggunakan metode kualitatif merupakan metode penelitian yang di dalamnya memuat dan menghasilkan data deskriptif contohnya berisi tulisan maupun ucapan atau tingkah laku orang – orang yang dilakukan pengamatan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif supaya dapat mengenali subjek serta dapat merasakan sesuatu hal yang dialami pada kehidupan sehari – hari (Moleong, 2009: 3). Dengan hasil tersebut peneliti memungkinkan untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan dapat di buktikan secara ilmiah.

Penelitian kualitatif memiliki keunggulan dalam memberikan data dekriptif secara detail dan lebih mendalam, data yang diperoleh di lapangan dilakukan secara fleksibel dengan dinamika yang ada di lapangan. Dalam hal ini penelitian kualitatif dapat diambil kesimpulan bahwa pada penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang melibatkan peneliti untuk langsung terjun ke lapangan agar dapat secara langsung berinteraksi kepada orang yang bersangkutan untuk memperoleh data dari objek penelitian secara langsung setelah itu diterjemahkan dengan memakai data deskriptif.

Penelitian tentang rekrutmen calon legislatif perempuan dalam memenuhi kuota 30% di Partai Nasdem Kabupaten Purworejo ini menggunakan pendekatan deskriptif – kualitatif. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan fakta – fakta dan data – data yang ada di lapangan di DPD Nasdem Kabupaten Purworejo yang kemudian akan ditafsirkan secara deskriptif yang dimana sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan indikator yang akan diteliti.

1.8.2 Lokasi penelitian

Pada penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Nasdem Kabupaten Purworejo yang beralamat di Jl. H. Agus Salim No.42-58, Tuksongo, Purworejo, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54151. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut bahwa dalam penelitian ini peneliti ingin lebih mengetahui proses berjalanya rekrutmen caleg perempuan Partai Nasdem Kabupaten Purworejo.

1.8.3 Unit Analisis

Dalam hal ini Hamidi berpendapat dalam unit analisis adalah berupa satuan yang akan dilakukan penelitian contohnya kelompok, individu, benda maupun kejadian dalam latar peristiwa sosial contohnya seperti kelompok sebagai subjek penelitian atau meneliti aktivitas individu (Hamidi, 2005: 75). Dalam penelitian ini unit analisis yang dipakai ialah Unit Analisis Organisasi. Unit Analisis Organisasi yang dimaksud

dalam penelitian ini yaitu Kantor DPD (Dewan Pimpinan Daerah)
Partai Nasdem Kabupaten Purworejo.

1.8.4 Metode Pengumpulan Data

➤ Data Primer

Data primer ini akan diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak – pihak yang bersangkutan dan terkait dengan penelitian yang akan saya teliti. Dengan turun langsung menyambangi kantor DPD Partai Nasdem di Kabupaten Purworejo yang bertujuan supaya mendapatkan data dan bentuk seperti hasil rekaman wawancara dengan berbagai sumber terkait.

➤ Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari bermacam – macam sumber lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal ini data sekunder yang mendukung data primer yang akan ditulis peneliti menggunakan artikel – artikel, refrensi internet, buku – buku, dan peraturan – peraturan yang ada kaitanya dengan Rekrutmen Caleg Perempuan. Pada penelitian ini dokumentasi ialah sumber data sekunder.

1.8.5 Teknik Pengumpulan data

➤ Wawancara

Wawancara dalam hal ini berisi tentang penjelasan kejadian, organisasi, perasaan, kepedulian, motivasi, orang, dan perasaan yang dialami pada masa lalu yang kebetulan diproyeksikan dengan harapan yang dialami di masa yang akan datang yang bertujuan mengubah serta memperluas informasi penelitian yang diperoleh dari sumber orang lain (Moleong, 2009: 186).

Pada penelitian kali ini peneliti melakukan metode wawancara dengan terstruktur terhadap narasumber yang dimana didalamnya berisi pertanyaan – pertanyaan secara spesifik yang akan digali dari narasumber.

Narasumber yang diwawancarai :

1. Ketua DPD Partai Nasdem dan Ketua Komisi I DPRD Purworejo yaitu Eko Januar Susanto, S.Ip. Wawancara ini agar memperoleh data terkait dengan mekanisme, kebijakan dan syarat dalam rekrutmen perempuan supaya bisa ikut serta dalam kontestasi politik, serta strategi yang diterapkan partai nasdem dalam pemenuhan kuota 30 % perempuan.
2. Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi yaitu Tri Sapto Argo. Wawancara ini agar memperoleh data terkait kaderisasi dalam menciptakan

kader perempuan yang berkompeten dan dapat diterima oleh masyarakat.

3. Caleg perempuan terpilih partai nasdem dan anggota legislatif DPRD Purworejo periode 2019 – 2024 yaitu Hj. Tursiyati, S.E. Wawancara ini agar memperoleh data terkait dengan faktor yang mendorong dalam keikutsertaan pada pemilu 2019, serta kendala yang dialami olehnya terkait rekrutmen pada partai politik yang dia ikuti dan langkah mewujudkan aspirasi serta kebijakan setelah terpilihnya maju ke legislatif dalam mewakili suara dan hak – hak perempuan .
4. Caleg Perempuan tidak terpilih partai nasdem yaitu Rini Puspendari. Wawancara ini bertujuan agar memperoleh data terkait dengan faktor yang mendorong dalam keikutsertaan pada pemilu 2019, serta kendala yang dialami pada berlangsungnya pemilu 2019, dan faktor yang menyebabkan gagal dalam maju ke legislatif.

➤ **Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan mengumpulkan serta mencari data yang berupa buku, catatan, transkrip, majalah, surat kabar, notulen, agenda, rapot, dll (Arikunto, 2006: 158). Pada kali ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun data dari dokumen tertulis ataupun elektronik dari

Kantor DPD Partai Nasdem Kabupaten Purworejo, KPUD Kabupaten Purworejo, dan dinas atau institusi terkait lainnya. Teknik dokumen sangat penting dalam melengkapi data yang lainnya.

1.8.6 Teknik analisis data

Pada penelitian ini proses analisa data merupakan berisi kumpulan data, menginterpretasi data, menganalisa data, kemudian kesimpulan yang mengacu pada analisa data. Pada penelitian ini tahap – tahap yang dilakukan untuk mengolah data yaitu (Moleong, 2004) :

a. Pengelompokan data

Dalam pengelompokan data peneliti melakukan penentuan data – data penting yang berhubungan dengan topik/tema dalam proposal penelitian ini yaitu Rekrutmen Caleg Perempuan Dalam Memenuhi Kuota 30% di Partai Nasdem Kabupaten Purworejo Tahun 2019.

b. Reduksi data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan sejumlah pemilihan data yang masih digunakan ataupun data yang sudah tidak dipakai.

c. Interpretasi

Dalam penelitian ini penafsiran yang dilakukan peneliti terhadap data yang telah dipilih yang akan dijadikan bahan untuk pembuatan proposal ini.

d. Uji Keabsahan Data Menggunakan Triangulasi

Moleong (2004) berpendapat bahwa Triangulasi merupakan teknik yang dilakukan untuk menguji keabsahan data dalam memanfaatkan sesuatu dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti memakai teknik Triangulasi untuk mengecek keabsahan data.

e. Kesimpulan

Dalam penelitian ini peneliti menentukan kesimpulan yang terdapat dari proposal penelitian yang telah dilakukan.